

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di era modernisasi sekarang ini pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan peraturan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut mendukung suatu Pemerintah Daerah agar dapat mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang baik dan taat aturan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Negara melalui penyusunan laporan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAK). Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan melalui proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Oleh karena itu, laporan keuangan daerah harus menyajikan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Pengelolaan keuangan daerah kota Surabaya yang terus mengalami peningkatan, yang dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh Pemerintah kota Surabaya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jatim dan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2016. Penghargaan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat Provinsi Jatim yang diperoleh pemerintah kota Surabaya sudah kali ke – 7 sejak tahun anggaran 2011. Penerapan sistem elektronik yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi alasan Pemkot Surabaya meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah kota Surabaya disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penelitian Prasisca, Kharlina, dan Yunita (2012) menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi membantu dalam penyajian informasi laporan keuangan yang sesuai dan bebas dari kesalahan saji. Penelitian Juwita (2013) membuktikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pemerintahan yang baik membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Silviana dan Antoni (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten di Jawa Barat. Namun pada hasil penelitian Saputra (2015) membuktikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang ada menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sehingga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi.

Pemerintah kota Surabaya telah mengintegrasikan sistem informasi akuntansi berupa aplikasi yang memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Prasisca, dkk. (2012) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dibuat dan diarahkan untuk mendukung proses pembuatan laporan keuangan guna memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang berkepentingan. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah kota Surabaya telah menerapkan berbagai aplikasi keuangan khususnya *e-accounting* yang merupakan *software* akuntansi *online* yang mendukung proses penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Surabaya yang mulai efektif diterapkan pada tahun 2016. Dengan menggunakan *software* akuntansi berbasis *online* memudahkan pihak internal dalam melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan pada pencatatan, memudahkan proses pengendalian serta pembuatan laporan keuangan dengan lebih efektif dan efisien serta sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah yang telah diterbitkan pihak eksternal dapat diakses dengan mudah pada *website* pemerintah kota Surabaya.

Penerapan sistem informasi akuntansi berupa *online software (e-accounting)* merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Informasi merupakan proses mengolah data atau informasi mentah agar menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat. Informasi yang dihasilkan pada laporan keuangan berasal dari data atau transaksi keuangan yang diolah menjadi laporan keuangan yang berisi informasi yang menggambarkan kinerja suatu instansi atau organisasi selama satu periode. Pada laporan keuangan daerah berisi informasi baik keuangan maupun non keuangan yang dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan pemerintah agar dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yang diharuskan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas informasi keuangan daerah didukung oleh pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi itu sendiri merupakan informasi keuangan dan non keuangan yang diperoleh dari kegiatan atau proses bisnis suatu organisasi. Informasi akuntansi diperoleh dari data keuangan yang telah diolah dan menghasilkan sebuah laporan - laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laporan. Menurut Hartani (2014), sistem informasi akuntansi berbasis komputer membantu organisasi dalam penyediaan laporan yang berkualitas, relevan, andal, tepat waktu dan minim kesalahan serta meningkatkan efisiensi perusahaan melalui pengurangan biaya-biaya tenaga kerja dibandingkan dengan SIA manual yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dalam proses pencatatan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan pada sektor pemerintahan kota surabaya dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) yang berlaku tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah kota memanfaatkan penggunaan sistem informasi akuntansi. Penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah ini tentunya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan juga mencegah terjadinya informasi keuangan yang fiktif melalui sistem informasi akuntansi yang transparan. Yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah di kota Surabaya. Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah merupakan instansi yang bertugas mengelola keuangan dan pendapatan pajak daerah kota Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan tahunan yang disusun dari laporan keuangan 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan menerapkan *software e-accounting* dinilai sangat membantu proses rekonsiliasi dan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian BPKPD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat akademik:

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu terkait bidang minat sistem informasi akuntansi, dan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya terkait pengaruh penerepan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

b. Manfaat praktik:

Memberikan kontribusi praktis bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dalam rangka upaya pengembangan dan perbaikan sehubungan dengan penerapan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan, melalui hasil survey responden terkait pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Berikut gambaran mengenai sistematika penulisan pada penulisan tugas akhir yang secara keseluruhan terdiri dari 5 bagian yang saling terhubung:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi dasar dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah berupa pertanyaan yang merumuskan permasalahan atau fenomena yang dibahas pada penelitian ini, tujuan penelitian untuk mengetahui

pengaruh penerapan SIA, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori – teori yang mendasari permasalahan yaitu dengan mereview laporan penelitian sebelumnya sejenis, lalu diperkuat dengan teori yang meliputi teori kegunaan-keputusan, sistem informasi akuntansi, laporan keuangan pemerintah, dan karakteristik kualitas laporan keuangan. Tahap selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, dan model analisis.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, identifikasi dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir teknik analisis data.

## **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

## **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang berupa masukan oleh peneliti bagi penelitian selanjutnya.